

EVALUASI PEMBANGUNAN PERTANIAN DI BALI SELAMA PJP I DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2000-2004^{*)}

KOMANG SUARTA dan I.G.K. SWASTIKA
Kanwil. Departemen Pertanian Propinsi Bali

ABSTRACT

During the first stage long-term development (PJP I), almost all of agriculture products increased. However, start the sixth five years development (Pelita VI), production of agriculture diminishing return or levelling off, even decrease like production of rice. Beside that, the agriculture of development to face the many problems linkage with agriculture land, irrigation water, pest and plant disease, production factors, post harvest, agriculture institution, etc.

Implemented the regional autonomy in 2001, so needed changing the agriculture development paradigm, which involve planning aspect, business orientation, behavior orientation, approach, and farmer's participation.

Program of agriculture development forward five years (2000-2004) namely: (1) Program of national food security, and (2) program of agribusiness development. Both of this programs its essence are to increase the welfare of agriculture community and to direct the vision of 21-decade agriculture i.e.: modern, strong, and efficient.

Keywords: Policy and Program, Development of Agriculture, Food security, and Development of Agribusiness.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan rumusan GBHN 1999-2004, esensi kebijaksanaan pembangunan pertanian adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian melalui pengembangan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Bertitik tolak dari arahan GBHN tersebut, maka paradigma atau visi pembangunan pertanian pada Abad 21 adalah pertanian moderan, tangguh dan efisien.

Guna mewujudkan tujuan pembangunan tersebut di tengah situasi krisis ekonomi nasional, maka kebijakan dan program pembangunan pertanian lima tahun ke depan adalah: (1) Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, diversifikasi pangan serta kelembagaan dan budaya lokal, (2) Mengembangkan agribisnis yang berorientasi global dengan pengembangan produk-produk unggulan daerah yang kompetitif dan keunggulan sumberdaya alam yang komparatif (Bappeda Tk I Bali, 1996).

Memasuki era globalisasi ekonomi dunia, maka strategi dan kebijaksanaan pembangunan pertanian Indonesia umumnya dan Bali khususnya perlu menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Hal ini membawa dampak terhadap arus perdagangan dan investasi, transfer teknologi, persaingan harga dan kualitas, kenyamanan, diversifikasi bentuk, purna jual dan sebagainya.

Menyongsong era otonomi daerah yang mulai berlaku 2001, maka Perencanaan dan Program Pembangunan Pertanian 2000-2004 juga perlu disesuaikan dengan pradigma baru hubungan pusat dan daerah, dan keunggulan komparatif wilayah.

EVALUASI PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DAERAH BALI

Kinerja Pembangunan Pertanian

Secara umum kinerja pembangunan pertanian dalam arti luas di daerah Bali adalah sebagai berikut:

1. Selama PJP I, hampir seluruh produksi pertanian meningkat. Tetapi mulai Pelita VI, perkembangan beberapa produksi pertanian mulai mengalami pelandaian (*leveling off*), bahkan menurun seperti produksi padi.
2. Peningkatan produksi komoditas pertanian ini menyebabkan daerah Bali mampu menyediakan pangan yang cukup untuk konsumsi penduduk dengan tingkat penyediaan kalori sebesar 3.416 kal/Kapt/Hari, yaitu 32 persen di atas standar kecukupan kalori nasional sebesar 2.500 kalori (Biro Pusat Statistik Propinsi Bali, 1998).
3. Walaupun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Bali cenderung menurun, yaitu hanya tinggal 19,1 persen tahun 1998, tetapi peranannya tetap penting dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok penduduk dan sebagai bahan baku industri. Sebagai perbandingan, kinerja pertumbuhan ekonomi Bali dan sektor pertanian per tahun sejak Pelita I sampai Pelita VI berdasarkan harga konstan disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Pertanian Bali, Pelita I-VI

Pelita	Pertumbuhan Ekonomi (persen per tahun)	Pertumbuhan Pertanian (persen per tahun)
I	7,32	3,00
II	8,55	3,96
III	14,28	11,86
IV	8,28	5,32
V	8,40	2,83
VI	7,83	3,50

4. Luas wilayah Propinsi Bali adalah 563.286 hektar terdiri dari 87.850 hektar lahan sawah (15,60 %) dan 475.436 hektar lahan bukan sawah/lahan kering (84,40 %), dan dari luas lahan kering ini sekitar 22,25 persen merupakan hutan negara. Luas lahan kritis di daerah Bali pada tahun delapan puluhan mencapai sekitar 100.000 ha dan dengan usaha rehabilitasi pada tahun 1997, luas lahan kritis menurun menjadi 80.000 ha, yang tersebar di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan berupa tanah tandus, tanah rusak, padang alang-alang serta tanah marginal lainnya.
5. Luas hutan di daerah Bali seperti tersebut di atas di bawah syarat minimal yang dianjurkan yakni 30 persen dari luas daratan, guna menjaga keseimbangan hidroorologi lingkungan yang baik. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Martopo (1990) dari Direktorat Pengairan Departemen Pekerjaan Umum bahwa daya dukung sumberdaya air di Bali maksimal hanya cukup untuk sekitar 3 juta penduduk. Sedangkan perimbangan antara persediaan dan kebutuhan air sudah mencapai 73,25 persen, suatu angka yang cukup kritis.
6. Selama 1995-1997, peranan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja memang menurun. Tahun 1995 angkatan kerja yang berstatus bekerja di Bali sebanyak 1.603.933 orang, sebanyak 665.151 orang (41,47%) terserap di sektor pertanian. Tahun 1997 angkatan kerja yang berstatus bekerja meningkat menjadi 1.645.408 orang dan yang terserap di sektor pertanian adalah 661.197 orang (40,18%). Sedangkan pada tahun tujuh puluhan sektor pertanian masih mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu di atas 50 persen (Biro Pusat Statistik Propinsi Bali, 1998).
7. Jumlah petani yang berkecimpung di sektor pertanian berdasarkan Sensus Pertanian (SP) Tahun 1993 adalah 343.873 KK Tani atau sekitar 58,57 persen

dari total KK yang ada. Jumlah petani ini meningkat 13.719 KK dibandingkan SP 1983, sehingga dengan luas lahan pertanian yang relatif sempit dan bahkan berkurang menyebabkan luas lahan yang dikuasai petani menurun.

8. Pembangunan pertanian di daerah Bali selama PJP I cukup berhasil meningkatkan produksi pertanian misalnya produksi beras naik rata-rata 2,16 persen setiap tahun dan mencapai puncaknya berupa swasembada beras tahun 1984. Sedangkan bila diamati produksi palawija, utamanya komoditi jagung dan kedelai, dari Pelita I hingga sekarang perkembangannya sangat lambat (lihat Tabel 1).
9. Perkembangan produksi hortikultura nampaknya cukup menggembirakan. dengan rata-rata pertumbuhan produksi per tahun (1969-1998) untuk sayuran sekitar 45 persen dan buah-buahan 23 persen. Produksi buah-buahan tahun 1998 mencapai 368.693 ton dan produksi sayuran mencapai 293.015 ton (Tabel 1).
10. Beberapa populasi ternak yang berkembang cukup baik di daerah Bali adalah sapi potong Bali, babi, kambing, ayam, dan itik, sehingga menyebabkan penyediaan daging dan telur terus meningkat. Produksi total daging pada tahun 1998 adalah 100.087 ton dan telur 10.874 ton (lihat Tabel 2).

Permasalahan Pembangunan Pertanian

Walaupun di satu pihak pembangunan pertanian di Bali telah menunjukkan keberhasilan, tetapi di pihak lain menghadapi permasalahan, yaitu:

Lahan Pertanian

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian produktif setiap tahun di satu pihak, tetapi di lain pihak jumlah petani juga terus meningkat, telah menyebabkan jumlah petani gurem (pemilikan lahan di bawah 0,5 ha) meningkat menjadi 50 persen, dengan pemilikan lahan yang sempit, kecil-kecil dan terfragmentasi.
2. Kondisi ini akan menyulitkan dalam mengembangkan usaha pertanian berskala ekonomi yang berwawasan agribisnis dengan usaha pertanian yang efisien, produktif dan berkualitas.

3. Penguasaan tanah dengan sistem penyakapan semakin menyebabkan penerapan teknologi kurang intensif, karena adanya perasanan kurang memiliki dari penyakap.
4. Kualitas kesuburan tanah, fisik tanah, kimia dan biologi tanah cenderung mengalami penurunan, disebabkan oleh pemakaian pupuk anorganik secara berlebihan, pemakaian pestisida serta perlakuan lainnya seperti traktorisasi. Beberapa sifat fisik yang berubah seperti struktur tanah menjadi keras, tanah menjadi sangat masam serta beberapa organisme yang berguna menjadi punah.

Air

1. Kompetisi pemanfaatan air semakin ketat antara PDAM, pariwisata (hotel), industri dan pertanian sehingga intensitas penanaman terutama di lahan sawah berkurang.
2. Kualitas air di beberapa tempat sangat menurun karena pencemaran limbah industri rumah tangga (usaha garmen), yang mempengaruhi kualitas produksi pertanian dan tingkat produktivitasnya.
3. Pompanisasi baik dalam pemanfaatan sumur bor maupun air sungai dalam usaha pertanian akan mengganggu sistem air tanah serta pencemaran lingkungan.
4. Pemboman, penggunaan racun, serta alat terlarang lainnya (setrum, jaring), baik di air tawar maupun di air laut dianggap sangat merusak lingkungan.

Hama dan Penyakit

1. Serangan Hama dan Penyakit masih menjadi masalah dalam usaha peningkatan produksi pertanian, seperti hama wereng coklat, penyakit tunggro, CPVD, penyakit jembrana, ND dan lain-lain.
2. Pemakaian pestisida dan insektisida yang berlebihan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Sarana Produksi

1. Ketersediaan benih atau bibit unggul, baik jumlah maupun mutu belum memadai, labelisasi benih atau bibit belum berjalan dengan baik.
2. Sistem distribusi pupuk yang kurang tepat waktu., mahalnnya harga pupuk, obat-obatan dan pakan ternak dan ikan, terbatasnya hijauan makanan ternak.

Pasca Panen

1. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi, berkisar antara 10-15 persen.
2. Adanya fluktuasi harga hasil pertanian yang sangat tajam.
3. Proses produksi yang sangat tergantung pada iklim atau musim, penanganan sortasi dan pengepakan yang belum dilaksanakan dengan baik.

Petani dan Kelembagaan

1. Jumlah Penduduk dan petani terus bertambah, sedangkan kemampuan pertanian untuk menyerap pertambahan tenagakerja hampir optimal, sehingga kondisi ini dapat menimbulkan kantong-kantong kemiskinnan baru.
2. Kemampuan petani dalam penguasaan tenologi sangat rendah. Demikian juga dalam hal penerapan sapta usaha belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan anjuran.
3. Posisi tawar petani relatif lemah terutama dalam penetapan harga hasil-hasil produksinya dan keterbatasan dalam akses perolehan kredit.
4. Keberadaan KUD belum mampu mengakomodasikan seluruh kepentingan petani yang sangat beragam jenisnya, mulai dari sarana produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan penjualan atau penampungan hasil produksinya.
5. Kelompok tani masih lemah, baik dalam hal kepemimpinannya, masih individual atau kurang berminat dalam kebersamaan, tidak ada yang mengikat baik fisik maupun sosial-budaya lainnya sehingga kelompok sangat labil.
6. Lembaga-lembaga tradisional yang akrab lingkungan banyak yang hilang seperti sekehe manyi diganti dengan sistem tebas. Keberadaan subak sudah mengalami perubahan sosial-ekonominya, seperti kegiatan gotong-royong menurun, pelanggran pola tanam, sistem bagi air yang mengarah ke teknis dan sebagainya.

Peluang Pembangunan Pertanian

Tanaman Pangan

1. Produktivitas actual (ton/ha) masih jauh di bawah produktivitas potensial, yaitu rata-rata hanya mencapai 70 persen.
2. Intensitas pertanaman (IP) lahan pertanian di daerah Bali sangat terbatas. Walaupun demikian, peluang peningkatan intensitas pertanaman dapat dilakukan pada lahan kering atau tegalan, lahan tidur, kehutan rakyat, lahan perkebunan utamanya untuk komoditas palawija seperti jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan.
3. Kelembagaan subak nampaknya merupakan potensi khusus yang bisa dimanfaatkan memberdayakan kelompok tani yang masih dipandang sangat lemah.

Peternakan

1. Permintaan yang tinggi terhadap produk daging, telur, susu, baik oleh penduduk lokal, domestik, maupun oleh wisatawan mancanegara merupakan tantangan sekaligus peluang yang sangat baik.
2. Penerapan sapta usaha, terutama rekayasa teknologi bibit dan pakan ternak akan dapat meningkatkan populasi dan produksi ternak.
3. Lahan kritis dan lahan tidur dapat dimanfaatkan untuk penanaman hijauan makanan ternak dan penerapan sistem tiga strata, sehingga dapat meningkatkan penyediaan pakan ternak.
4. Limbah hasil pertanian seperti jerami belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pakan ternak.
5. Peluang pasar utamanya perdagangan antar pulau komoditas peternakan akan merangsang petani untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil tenak.

ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Kebijakan Pembangunan Pertanian Selama PJP I

1. **Arahan GBHN.** Sejak Pelita I –VI arahan GBHN tetap menggraiskan bahwa titik berat pembangunan nasional diletakkan pada sektor pertanian dengan landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 45 serta landasan operasional GBHN. Sedangkan dalam GBHN 1999-2004 belum secara tegas dinyatakan sektor pertanian sebagai sektor andalan.
2. **Tujuan Pembangunan.** Tujuan pembangunan pertanian dari Pelita ke Pelita pada prinsipnya adalah meningkatkan produksi pertanian guna meningkatkan kesejahteraan para petani, tetapi dari tahun ke tahun ada penambahan penekanan seperti meningkatkan devisa melalui ekspor, memperluas kesempatan kerja, memantapkan swasembada pangan dan sebagainya.
4. **Strategi Pembangunan Pertanian.** Strategi merupakan taktik, siasat dan cara yang harus ditempuh guna memenangkan suatu tujuan tertentu melalui serangkaian kegiatan. Penjabaran strategi pembangunan pertanian dari Pelita I–VI bervariasi antara strategi dasar, arahan pembangunan pertanian, pendekatan pembangunan pertanian serta usaha-usaha pokok pembangunan pertanian. Salah satu strategi yang sering-sering disebut adalah Trimatra Pembangunan Pertanian, yaitu:: usaha tani terpadu, komoditi terpadu dan wilayah terpadu (Departemen Pertanian RI., 1990).
5. **Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian.** Bila diteliti naskah Pelita Pembangunan Pertanian dari Pelita I–VI tentang istilah kebijaksanaan pembangunan pertanian ada dalam bentuk kebijaksanaan Umum, kebijaksanaan operasional, kebijaksanaan dasar, langkah-langkah operasional yang pada esensinya ditujukan kepada kebijaksanaan peningkatan produksi pertanian guna kesejahteraan petani melalui usaha-usaha pokok yaitu: intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi serta pengembangan faktor-faktor produksi.
5. **Program Pembangunan pertanian.** Program pokok pembangunan pertanian dari Pelita I–V adalah program peningkatan produksi pertanian (Pertanian dan TPH, Peternakan, Perkebunan dan perikanan), sedangkan mulai Pelita VI

program pokok pembangunan pertanian adalah Program P2RT, Program UP, Program DPG dan Program PSSPP.

Perubahan Paradigma Menyongsong Otonomi Daerah

1. Penyelenggaraan suatu pemerintahan yang bersifat pelayanan dan pembangunan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu: **fungsi alokasi** (alokasi sumber-sumber ekonomi dan pelayanan masyarakat), **fungsi distribusi** (distribusi pendapatan, pemerataan pembangunan), dan **fungsi stabilitas** (pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter).
2. Fungsi distribusi dan stabilitas nampaknya lebih efektif oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi umumnya lebih efektif dilaksanakan pemerintah daerah karena daerah lebih mengetahui kebutuhan pelayanan masyarakat setempat.
3. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas tetapi bertanggung jawab yang disertai dengan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
4. Diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 diperlukan adanya perubahan paradigma kebijaksanaan pembangunan pertanian antar lain: dari perencanaan terpusat menjadi perencanaan otonom, dari orientasi produksi menjadi orientasi pasar, dari orientasi ekonomi menjadi orientasi pada manusia, dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan yang berbasis kewilayahan yang holistik, dari sistem perencanaan dari atas ke bawah (top down) menjadi dari bawah ke atas (bottom up) atau sistem perencanaan pembangunan partisipatif atau kombinasi keduanya.
5. Fungsi stabilitas oleh pemerintah pusat dalam bidang pertanian seperti swasembada pangan, yaitu kemampuan negara untuk memenuhi kecukupan pangan seluruh penduduk, meliputi aspek ketersediaan jumlah dan mutunya, aksesibilitas (keterjangkauan), stabilitas dan kontinuitas pengadaan, distribusi dan keamanan pangan. Sedangkan daerah berusaha semaksimal mungkin mengembangkan potensi yang ada guna dapat memberikan distribusi terhadap ketersediaan pangan nasional.

6. Perencanaan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan daerah seluas mungkin sebagai perwujudan dari sistem perencanaan yang bersifat "**Bottom Up Planning**" serta mengurangi kebijaksanaan pusat yang bersifat "**Top Down Planning**". Kebijaksanaan ini telah dituangkan dalam SK Mentan 363 Tahun 1995 dan sejak tahun 1994 telah dilaksanakan **Rakorbangtan II** dan **Rakorbangtan I** guna menyerap aspirasi daerah sebesar-besarnya.
7. Permasalahan yang ada sampai saat ini guna merealisasikan UU 22 Tahun 1999 adalah : 1) Jumlah dan kualitas SDM yang kurang memadai karena sistem perencanaan yang dominan bersifat top down selama 30 th, 2) Informasi dan data tentang pemberdayaan sumberdaya manusia masih sangat terbatas, 3) Kuatnya peranan DPRD terhadap penyusunan APBD akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam arti luas, 4) Relatif kecilnya PAD untuk pembiayaan pembangunan pertanian wilayah akan mengakibatkan ketergantungan propinsi kepada pusat.
8. Sejak tahun Anggaran 1996/1997, pembahasan anggaran pembangunan dilaksanakan di daerah yang dikenal dengan DIP rincian, dengan ketentuan untuk DIP yang pagu anggarannya sampai dengan 300 juta dan tidak berbantuan luar negeri.
9. Pada tahun anggaran 1997/98 kebijaksanaan tersebut terus dilanjutkan tetapi pagu anggarannya ditingkatkan menjadi 500 juta.
10. Selanjutnya mulai pada T.A 1999/2000 , pembahasan DIP maupun revisinya diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan daerah dengan tidak dibatasi lagi pagunya, baik yang berasal dari rupiah murni maupun bantuan luar negeri (BLN), kecuali DIP-DIP Pusat, DIP yang mencakup beberapa Propinsi, DIP-BLN yang memerlukan koordinasi pusat dan DIP yang memerlukan kebijaksanaan nasional.

Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian 2000-2004

Visi dan Misi

Visi : Menciptakan pertanian modern, tangguh, efisien Menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

- Misi : 1. Menggerakkan berbagai upaya untuk memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal dan menerapkan teknologi tepat serta spesifik dalam rangka pembangunan pertanian yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan;
2. Memerdayakan masyarakat pertanian menuju wiraswasta yang mandiri, maju dan sejahtera.

Tujuan Pembangunan Pertanian

Adapun tujuan Pembangunan Pertanian 2000-2004, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui pengembangan usaha pertanian dengan wawasan agribisnis.
2. Meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dalam rangka mencapai ketahanan pangan nasional.
3. Meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk memanfaatkan pasar bahan baku industri pengolahan dan ekspor.
4. Mengembangkan kesempatan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha yang efisien melalui pengembangan agribisnis.
5. Mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengembangan agribisnis berwawasan lingkungan.

Sasaran Pembangunan Pertanian

Sasaran Pembangunan Pertanian 2000-2004 antara lain :

1. Meningkatkan produktivitas usaha pertanian, industri dan ekspor.
2. Meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian.
3. Meningkatkan pendapatan rumah tangga tani.
4. Meningkatkan produksi pangan lokal (non beras).
5. Meningkatkan pangan sumber protein, vitamin dan mineral.
6. Meningkatkan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
7. Meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas pertanian untuk ekspor.
8. Meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.
9. Meningkatkan kesempatan kerja.

10. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis di pedesaan.
11. Terpeliharanya sumberdaya alam dan pembangunan berwawasan lingkungan.

Strategi Pembangunan Pertanian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian, maka ditempuh strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan prasarana publik bagi petani.
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan penerapan teknologi spesifik lokasi dan tepat guna, pelayanan sarana produksi, permodalan, mekanisasi pertanian, penyuluhan, dll.
3. Pemanfaatan dan perluasan spektrum usaha pertanian (pasca panen, pengolahan dan diversifikasi produk).
4. Penerapan iptek ramah lingkungan.
5. Pengembangan kualitas SDM pertanian.
6. Penciptaan kondisi kondusif ekonomi pertanian melalui penciptaan peraturan, insentif usaha, kebijakan pasar, layanan publik dll.

Program Pembangunan Pertanian 2000-2004

1. Program Pembangunan Pertanian Sebelum Tahun 2000
 - Selama PJP I program Departemen Pertanian lebih ditekankan kepada peningkatan produksi pertanian, dan kebijaksanaan ini telah mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara berswsembada pangan, khususnya Beras.
 - Tetapi nampaknya produksi yang berlimpah ini belum diimbangi dengan meningkatkan pendapatan para petani di pedesaan. Oleh karena itu mulai Pelita VI kebijaksanaan pertanian lebih difokuskan kepada pendapatan dan kesejahteraan.
 - Untuk itu dalam Pelita VI kebijaksanaan pertanian dilakukan melalui tiga pendekatan dasar, yaitu pendekatan sumberdaya, pendekatan agribisnis dan pendekatan keterpaduan. Dengan tiga pendekatan ini, maka munculah empat program pokok Pertanian, yaitu: 1) Peningkatan Pertanian Rakyat

Terpadu (P2RT), 2) Pembangunan Usaha Pertanian (PUP). 3) Diversifikasi Pangan Dan Gizi (DPG), dan 4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (Departemen Pertanian RI, 1999).

- Program dan Proyek P2RT diarahkan kepada pertanian rakyat untuk meningkatkan produktivitas usahatani, mengembangkan komoditas unggulan dengan pembentukan sentra-sentra pertanian yang berskala ekonomi, seperti salak dan sapi potong Bali.

2. Program Pembangunan Pertanian Tahun 2000-2004

Program pembangunan pertanian tahun 2000-2004 ini merupakan kelanjutan dari program pembangunan Pelita VI yang esensinya adalah pengembangan agribisnis. Untuk itu telah dirumuskan dua program utama pembangunan pertanian yaitu: (1) Program Ketahanan Pangan Nasional (Program KP), dimaksudkan untuk mengoperasionalkan kebijakan peningkatan ketahanan pangan nasional, dan (2) Program Pengembangan Agribisnis (Program PA), dimaksudkan untuk mengoperasionalkan kebijakan pembangunan pertanian berwawasan agribisnis (Departemen Pertanian RI, 2000).

Program Ketahanan Pangan Nasional (KP). Program KP Nasional diartikan sebagai kemampuan negara untuk memenuhi kecukupan pangan seluruh penduduk. Kebijaksanaan KP ini meliputi aspek ketersediaan jumlah dan mutunya, aksesibilitas (keterjangkauan), stabilitas dan kontinuitas pengadaan, distribusi dan keamanan pangan. Tujuan Program KP adalah meningkatkan ketersediaan komoditas pangan pokok dalam jumlah yang cukup, kualitas yang memadai, dan tersedia sepanjang waktu. Sasaran Program KP adalah (1) Meningkatkan produksi beras, (2) Meningkatkan produksi pangan sumber karbohidrat alternatif non beras yang berakar pada sumberdaya dan budaya lokal, (3) Meningkatkan produksi pangan protein dan (4) meningkatkan keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan.

Komoditas yang termasuk dalam program KP ini adalah komoditas pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat nasional yang diusahakan oleh para pelaku usaha skala kecil seperti padi, kedelai, umbi-umbian, ayam buras, itik, kambing, domba, sapi, dan kerbau. Beberapa kegiatan utama program KP seperti (1)

Peningkatan luas areal tanam, (2) Peningkatan produktivitas tanaman, (3) menerapkan iptek spesifik lokasi dan yang ramah lingkungan, (4) meningkatkan akses petani dalam permodalan, pasar, dan sarana produksi, (5) mengembangkan industri pengolahan primer pangan pokok non beras, (6) penganeekaragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat, dan (7) penyediaan layanan publik seperti penelitian, pendidikan dan latihan dan kursus, penyuluhan, sarana publik dan sebagainya.

Program Pengembangan Agribisnis (PA). Program PA dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan pertanian dalam menerapkan sistemn usahatani supaya berwawasan agribisnis dengan berbagai aspek kebijakan, seperti produktivitas dan efisiensi, peningkatan kualitas dan nilai tambah, berdaya saing tinggi, berorientasi pasar, berorientasi ekspor dan bahan baku industri, komoditas yang ditangani seperti komoditas hortikultura, komoditas komersil pangan, peternakan, perikanan di luar komoditas KP. Sasaran program ini adalah (1) meningkatkan produksi pertanian yang berdaya saing tinggi di pasar domestik dan ekspor, (2) produktivitas tinggi, efisien dan meningkatkan kesempatan kerja, (3) Berkembangnya pembangunan ekonomi wilayah pedesaan yang berbasis agribisnis.

Beberapa kegiatan utama program PA adalah: (1) menumbuhkan sentra-sentra komoditas unggulan, (2) peningkatkan mutu produksi pertanian, (3) Penerapan iptek dalam panen, pasca panen dan pengolahan hasil, (4) meningkatkan kelembagaan pemerintah, (5) meningkatkan akses petani dalam permodalan, pasar dan kelembagaan, (6) meningkatkan rekayasa teknologi pertanian tepat guna, spesifik lokasi untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal, (7) menyediakan informasi tentang peluang investasi dan agribisnis, peluang pasar, harga produksi dan sarana produksi pertanian serta promosi produk unggulan.

Selain dua program utama, terdapat pula tiga program penunjang pembangunan pertanian, yaitu: (!) Program Pembinaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (2) Program Penguasaan Teknologi, dan (3) Program Pengembangan Dan Penyempurnaan Statistik

Agenda Reformasi Pertanian

Di era reformasi ini, pertanian di Indonesia juga perlu melakukan reformasi dengan agenda sebagai berikut:

1. Menciptakan sektor pertanian menjadi sektor andalan dan mesin penggerak perekonomian nasional.
2. Pembangunan dengan keberpihakan kepada petani.
3. Mempertajam implementasi misi pembangunan pertanian.
4. Meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani.
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat oleh aparat pemerintah.
6. Revitalisasi kelembagaan dan aparat, percepatan otonomi pertanian.
7. Meningkatkan keterkaitan antar subsistem dalam system agribisnis.
8. Mempertajam arah pembangunan dengan pengembangan produk unggulan berdaya saing tinggi, berorientasi pasar dan berwawasan lingkungan.

Kebijaksanaan

1. Kebijakan dan program ketahanan pangan melalui al: peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, penurunan suku bunga dan peningkatan pencairan kredit KUT, subsidi pupuk dan benih, paket bantuan bibit dan saprodi lainnya, perbaikan gizi keluarga, bantuan peralatan dan mesin pertanian serta perbaikan sarana dan prasarana pertanian (bendungan dan saluran irigasi, dll.)
2. Pemberdayaan petani dan kelompok tani melalui sistem “Ekonomi Kerakyatan”, seperti pengembangan kelompok tani menjadi koperasi, kursus kelompok tani dan SL-A, pembinaan SLPHT, pembinaan hubungan kemitraan kelompok tani-perusahaan inti, magang petani, inkubator bagi petani, bantuan penguatan modal kelompok tani dan koperasi.
3. Pengembangan SPAKU (Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan) seperti salak, manggis, jeruk, sapi, ayam buras, dan babi.
4. Gerakan mandiri peningkatan produksi pertanian seperti : Gema Palagung 2001, Gema Hortina 2003, Gema Proteina 2001.
5. Diversifikasi pangan melalui pengembangan pangan lokal, yaitu pangan pokok selain beras seperti, jagung dan umbi-umbian.

6. Ketahanan pangan diartikan sebagai kemampuan daerah untuk memenuhi kecukupan pangan seluruh penduduk baik jumlah, kualitas dan aksesibilitas.
7. Masalah lahan seperti konsolidasi pemilikan lahan, peningkatan intensitas pertanaman (IP), PAT-perluasan areal tanam, Pembuatan RUTR
8. Masalah air: penerapan varietas hemat air, peningkatan peranan Subak, pengetatan pola dan atau pergiliran tanaman, perbaikan jaringan irigasi, pembuatan bendungan, embung dan pompanisasi
9. Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI), seperti penyuluhan dan pembinaan penerapan sapta usaha tani dengan baik. lomba-loma produksi, Demplot, Denfarm.
10. Pembinaan peningkatan kualitas hasil pertanian guna dapat bersaing di pasar domestik maupun di pasar internasional.
11. Penanganan pasca panen dan pemasaran, pembinaan pengolahan hasil, dll.
12. Pengembangan usahatani Terpadu dengan Konsep **CORPORATE FARMING** dalam rangka pemberdayaan petani yang berlahan sempit, yaitu petani yang kecil-kecil sebagai pemegang saham agar menyerahkan lahannya kepada suatu "perusahaan tani" atau Koperasi untuk dikelola secara komersial.

Konsep usahatani ini akan mengikuti tantangan pembangunan masa depan, keberadaan kelompok tani diarahkan menjadi "Perusahaan Tani" (Sutjipta, 1997). Kelompok tani harus maju, dan untuk itu harus ada faktor pengikat yang kuat dan syarat yang ideal untuk itu adalah subak. Untuk menjadikan subak atau kelompok tani menjadi semacam perusahaan tani, maka perlu diupayakan al. :

- Subak atau kelompok harus mengangkat seorang manager dan pengurus lainnya untuk dapat bekerja secara professional.
- Petani diikutkan sebagai pemegang saham sesuai dengan luas garapannya sebagai faktor pengikat.
- Seluruh rangkaian subsistem agribisnis (agroinput- produksi-pasca panen) ditangani oleh perusahaan secara kordinatif.
- Penanaman, panen dan sebagainya dilakukan oleh kelompok bukan secara individual. Jadi Kelompok betul-betul komersial berwawasan agribisnis.

- Petani dapat bekerja atau tidak di perusahaan kelompok dengan upah dari perusahaan.
- Bantuan paket serta bantuan kredit lainnya oleh pemerintah dengan sistem proyeknya diharapkan langsung masuk ke wadah kelompok.

PENUTUP

1. Selama PJP I, hampir seluruh produksi pertanian meningkat. Tetapi mulai Pelita VI, perkembangan beberapa produksi pertanian mulai mengalami pelandaian (*leveling off*), bahkan menurun seperti produksi padi. Peningkatan produksi komoditas pertanian ini menyebabkan daerah Bali mampu menyediakan pangan yang cukup untuk konsumsi penduduk dengan tingkat penyediaan kalori sebesar 3.416 kal/Kapt/Hari, yaitu 32 persen di atas standar kecukupan kalori nasional sebesar 2.500 kalori (Biro Pusat Statistik Propinsi Bali, 1998).
2. Walaupun di satu pihak pembangunan pertanian telah menunjukkan keberhasilan, tetapi di pihak lain menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan lahan pertanian, air irigasi, hama dan penyakit tanaman, sarana produksi, pasca panen, kelembagaan pertanian, dan lain-lain.
3. Menyongsong diberlakukannya otonomi daerah 2001, diperlukan adanya perubahan paradigma kebijaksanaan pembangunan pertanian antar lain: dari perencanaan terpusat menjadi perencanaan otonom, dari orientasi produksi menjadi orientasi pasar, dari orientasi ekonomi menjadi orientasi pada manusia, dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan yang berbasis kewilayahan yang holistik, dari sistem perencanaan dari atas ke bawah (*top down*) dan dari bawah ke atas (*bottom up*) menjadi sistem perencanaan pembangunan partisipatif atau keduanya.
4. Program Pembangunan Pertanian Tahun 2000-2004 merupakan kelanjutan dari program pembangunan Pelita VI yang esensinya adalah pengembangan agribisnis. Untuk itu telah dirumuskan dua program utama pembangunan pertanian yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Program KP), yang dirumuskan untuk mengoperasionalkan kebijakan peningkatan ketahanan pangan, dan (2) Program Pengembangan Agribisnis (Program PA), dimaksudkan untuk mengoperasionalkan kebijakan pembangunan pertanian berwawasan agribisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Tk. I Bali. 1996. Pembangunan Pertanian Terpadu Propinsi Daerah Tingkat I Bali. PT. Informatika Bina Terpadu.
- Biro Pusat Statistik Propinsi Bali. 1990. Statistik Ketenaga Kerjaan Propinsi Bali 1997. Hasil Susenas 1997. Kantor Statistik Propinsi Bali.
- Biro Pusat Statistik Propinsi Bali. 1998. Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Propinsi Bali. Hasil Susenas 1997. Kantor Statistik Propinsi Bali
- Departemen Pertanian RI. 1990. Repelita VI Pertanian. Departemen Pertanian Republik Indonesia.
- Departemen Pertanian Kantor Wilayah Propinsi Bali, 1999. Statistik Pertanian Propinsi Bali Tahun 1998. Proyek PSSPP Bali, Denpasar 1999.
- Departemen Pertanian RI. 2000. Kebijakan Dan Program Utama Pembangunan Pertanian. Departemen Pertanian RI, Jakarta, Januari 2000.
- Departemen Pertanian. 1999. Kebijakan Program Proyek Dan Penganggaran Pembangunan Subsektor Tanaman Pangan Dan Hortikultura T.A 2000/2001. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Nopember 1999.
- Sutjipta Nyoman. 199. "Strategi Pembangunan Pertanian Daerah Bali Dalam Era Globalisasi". Seminar Nasional Pembangunan Bali Menyongsong Abad 21. Bappeda Tingkat I Bali.

Tabel 1. Produksi Padi dan Palawija di daerah Bali Tahun 1994-1998 (Ton)

No	Komoditas	1994	1995	1996	1997	1998
1	Padi	801.505	831.172	840.564	791.196	825.934
2	Jagung	85.286	90.800	917.704	107.395	113.921
3	Kedelai	30.702	23.321	28.886	29.443	23.533
4	Ubi Kayu	173.623	159.851	211.498	221.410	213.308
5	Ubi Jalar	100.366	81.701	83.167	86.856	91.386
6	Kc. Tanah	14.300	15.490	15.921	19.052	21.134
7	Kc. Hijau	30.702	23.321	28.866	2.074	2.680

Sumber : Departemen Pertanian, Kantor Wilayah Propinsi Bali, 1990.

Tabel 2. Populasi dan produksi Peternakan di daerah Bali Tahun 1994-1998 (Ekor/Ton)

No	Komoditas	1994	1995	1996	1997	1998
	Populasi					
1	Sapi	499.972	513.672	528.398	538.753	524.615
2	Kambing	116.789	116.179	116.940	122.225	110.348
3	Babi	1.056.318	1.079.831	1.073.062	1.131.283	967.422
4	Aym.Buras	5.129.637	5.312.956	6.349.474	6.544.878	5.672.902
5	Ay.Ras petelur	1.476.660	1.634.225	1.726.907	1.767.992	924.605
6	Ay.Ras Pedaging	1.608.678	2.108.799	2.310.160	2.641.817	1.459.634
	Produksi					
1	Daging	100.591,94	110.736,78	118.756,55	119.938,24	97.208
2	Telur	15.170,16	16.366,15	17.040,60	17.529,83	10.874
3	Susu	119,61	111,42	94,10	83,49	64,68

Sumber : Departemen Pertanian, Kantor Wilayah Propinsi Bali, 1990.